

CROSS SECTOR COLLABORATION: TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Fatwandy Nur¹, Hasniati² & Nurlinah³

¹ Mahasiswa Program Doktor Universitas Hasanuddin

E-mail: nurfatwandy@gmail.com

² Universitas Hasanuddin

E-mail: hasniati@unhas.ac.id

³ Universitas Hasanuddin

E-mail: mnurlinah@yahoo.com

Abstrak

Kemitraan lintas sektor diperlukan untuk transformasi layanan publik digital di Indonesia. Namun, kapasitas yang tidak memadai, kekurangan infrastruktur, dan kurangnya akuntabilitas masih terlihat di tingkat daerah. Studi kasus ini menyelidiki bagaimana kolaborasi lintas sektor mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan melihat lima aspek: kondisi awal, proses, struktur dan tata kelola, faktor pendorong dan penghambat, dan keluaran dan akuntabilitas. Studi ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan delapan informan utama yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Masalah SDM, infrastruktur, dan koordinasi pada fase awal menghambat adopsi digital, dan (2) proses kolaborasi meningkat secara bertahap melalui pemetaan kebutuhan, penyusunan MoU/PKS, pembentukan tim koordinasi lintas-OPD, forum pengarah, dan keberanian komunikasi (3) Struktur dan tata kelola menggabungkan tim pengarah, teknis, dan evaluasi dengan mekanisme akuntabilitas seperti berita acara, audit inspektorat, dan pelaporan digital (4) Beberapa pendorong utama adalah dukungan pimpinan dan kemitraan strategis seperti (UGM/CfDS, PLN ICON+, Telkom, RRI, dan dukungan pusat), akan tetapi Stabilitas jaringan, disparitas literasi digital, dan keterbatasan anggaran adalah tantangan utama (5) Hasil awal termasuk layanan integrasi seperti Srikandi, keterhubungan SIMPEG nasional, peningkatan konektivitas seperti penarikan FO ke desa, dan peningkatan indeks SPBE dan praktik akuntabilitas kolaboratif. Studi ini memberi kontribusi pada konsep *cross sector collaboration* yaitu kolaborasi lintas sektor tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat koordinasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan berbasis digital.

Kata kunci: Kolaborasi lintas sektor; Transformasi digital; Layanan publik

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam layanan publik di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu prioritas strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efektif dan akuntabel (R. Y. Maulana et al., 2025). Namun, pada level daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat, pelaksanaan transformasi digital masih berhadapan dengan berbagai tantangan multidimensi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, resistensi birokrasi, hingga kesenjangan literasi digital di kalangan aparatur (Martitah et al., 2021). Kondisi ini memperlihatkan bahwa hambatan utama bukan hanya terletak pada aspek teknologinya, tetapi juga pada kesiapan

kelembagaan dan pola kolaborasi lintas sektor yang belum optimal dalam mendukung transformasi tersebut (R. Y. Maulana et al., 2022). Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai institusi publik di daerah otonom dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan berbagai aktor mulai dari sektor publik, swasta, hingga komunitas masyarakat guna memperkuat kolaborasi lintas sektor yang menjadi prasyarat keberhasilan transformasi digital layanan publik (Salam & Ridwan, 2025). Permasalahan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya tata kelola kolaboratif yang kuat dan berbasis akuntabilitas, transformasi digital hanya akan menjadi slogan tanpa hasil nyata yang berkelanjutan (Qaedi & Nugroho, 2023).

Transformasi digital di sektor publik menuntut perubahan paradigma tata kelola dari sistem birokratik yang kaku menuju model kolaboratif yang adaptif dan akuntabel (Rozikin et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, penerapan *collaborative governance* menjadi solusi untuk menjembatani keterbatasan koordinasi antarinstansi dan meningkatkan integrasi kebijakan digital di tingkat daerah (Mukhlis & Perdana, 2022). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola kolaboratif sering terhambat oleh lemahnya kepemimpinan fasilitatif, ego sektoral, dan ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang jelas antar actor. Tantangan ini juga tercermin di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di mana struktur koordinasi antarperangkat daerah masih bersifat silo dan belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian hasil kolaboratif (Tando et al., 2020). Oleh karena itu, penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen kunci untuk menjamin keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan publik digital di daerah.

Akuntabilitas kolaboratif merupakan dimensi penting dalam memastikan bahwa hasil kolaborasi lintas sektor berorientasi pada kepentingan publik dan bukan kepentingan institusi semata. Dalam konteks kolaborasi digital, akuntabilitas mencakup transparansi proses, keterlibatan publik, serta pelaporan kinerja yang dapat diverifikasi secara terbuka melalui sistem berbasis data (Susniwati & Zamili, 2022). Oleh karena itu, penataan ulang sistem pelaporan lintas lembaga serta penyusunan indikator kinerja kolaboratif berbasis outcome perlu dilakukan agar kolaborasi digital daerah dapat mencapai hasil yang terukur dan berkelanjutan (Arianny & Adisasmito, 2024). Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen pembelajaran bersama untuk memperkuat efektivitas kolaborasi lintas sektor.

Teori *collaborative governance* yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash menekankan empat elemen utama: kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang berkelanjutan (Yahya & Sudarmo, 2022). Penerapan teori ini dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia memerlukan penyesuaian terhadap faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi hubungan antaraktor publik dan non-publik (Niki et al., 2020). Dalam kerangka transformasi digital, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan, legitimasi, dan komitmen bersama dapat menjadi pendorong keberhasilan kolaborasi di tengah perubahan struktur birokrasi yang sedang berlangsung (Prasetyo et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya

menerapkan teori *collaborative governance* sebagai lensa analisis untuk memahami dinamika interaksi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya mempercepat transformasi digital layanan publik daerah (Asropi et al., 2022).

Dalam literatur administrasi publik, kolaborasi lintas sektor (*cross-sector collaboration*) dipandang sebagai pendekatan efektif untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kebijakan publik, termasuk dalam konteks transformasi digital (McNamara & Morris, 2022). Teori kolaboratif ini menekankan pentingnya integrasi aktor dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan bersama melalui mekanisme koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antar pemangku kepentingan (Utari et al., 2023). Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan model kolaboratif di Indonesia masih menghadapi hambatan seperti ego sektoral, lemahnya kapasitas kepemimpinan kolaboratif, serta belum adanya sistem akuntabilitas yang terintegrasi dalam praktik tata kelola digital daerah (Martitah et al., 2021). Selain itu, model kolaborasi yang banyak diadopsi dari konteks negara maju sering kali tidak mampu menjawab dinamika sosial-politik daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik birokrasi tersentralisasi dan sumber daya terbatas (Rosyadi et al., 2021). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan konseptual antara teori kolaborasi lintas sektor yang ideal dengan realitas implementasi di daerah seperti Sulawesi Barat, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui analisis empiris terhadap dinamika kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital layanan publik daerah.

Permasalahan kolaborasi lintas sektor di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tampak jelas dari masih belum terintegrasinya koordinasi antara perangkat daerah dalam mengelola agenda transformasi digital. Setiap OPD cenderung beroperasi dengan prioritas dan aplikasi masing-masing, sehingga forum koordinasi lintas OPD lebih sering bersifat administratif dari pada menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan arah kebijakan dan integrasi sistem digital di daerah. Kondisi ini membuat inisiatif digital berjalan dengan sendiri-sendiri, misalnya adanya tumpang tindih aplikasi, perbedaan standar data, serta keterbatasan mekanisme berbagi informasi antarinstansi. Di sisi lain, struktur kelembagaan yang masih hierarkis dan budaya kerja yang sektoral membuat proses pengambilan keputusan kolaboratif berjalan lambat, sehingga respons terhadap kebutuhan layanan digital masyarakat tidak selalu sejalan dengan dinamika di lapangan. Salah satu penyebab terjadinya masalah tersebut disebabkan masih lemahnya aspek manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang mana nilai hasil evaluasi domain Manajemen SPBE yaitu 2,18 yang terdiri dari penerapan manajemen SPBE 1,88 dan Audit TIK sebesar 3,00, rendahnya hasil pada aspek ini mengindikasikan bahwa praktik-praktik manajemen tersebut belum diterapkan secara optimal.

Hal ini dapat disebabkan oleh belum tersusunnya kerangka kerja yang jelas untuk manajemen risiko dan keamanan informasi, lemahnya pengelolaan aset serta data, dan minimnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan SPBE. Kondisi tersebut juga mencerminkan keterbatasan sumber daya manusia di bidang TIK, kurangnya pelatihan, serta terbatasnya dukungan kebijakan dan anggaran.

Selain itu, faktor seperti kepemimpinan yang belum konsisten dan ketiadaan target kinerja yang terukur turut memperburuk kondisi manajemen SPBE di daerah ini. Situasi ini menggambarkan permasalahan umum di berbagai instansi pemerintah, di mana aspek manajemen kerap menjadi titik terlemah dalam penilaian SPBE. Kelemahan pada domain manajemen perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Upaya perbaikan sebaiknya difokuskan pada penguatan manajemen internal, melalui penyusunan kebijakan operasional yang lebih terarah, peningkatan kompetensi aparatur di bidang TIK, serta penguatan kolaborasi lintas sektor yang dapat dibangun oleh pemerintah daerah provinsi sulawesi barat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kematangan SPBE di Sulbar dapat meningkat dan mendukung keberlanjutan tata kelola pemerintahan digital yang lebih efektif di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini berfokus pada fenomena kolaborasi lintas sektor dalam proses transformasi digital layanan publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang menghadapi tantangan struktural, teknologis, dan kultural pada setiap tahap implementasinya. Fenomena ini mencerminkan dinamika perubahan tata kelola pemerintahan daerah yang berupaya beralih dari sistem pemerintahan konvensional menuju tata kelola digital yang kolaboratif dan berbasis akuntabilitas publik (Octamaya & Awaru, 2024). Tantangan yang ditemukan mencakup kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta ego sektoral antarinstansi yang memperlambat transformasi digital daerah (Prayitno, 2023). Dengan demikian, fenomena kolaborasi lintas sektor di Sulawesi Barat menjadi kasus penting untuk dianalisis karena merepresentasikan upaya adaptasi birokrasi lokal terhadap kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam konteks daerah dengan kapasitas administrasi yang masih berkembang (Rahmat et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan memahami fenomena kolaborasi lintas sektor dalam konteks nyata pemerintahan daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap dinamika sosial, kelembagaan, dan teknologi yang memengaruhi proses transformasi digital layanan publik (Tando et al., 2020). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terlibat langsung dalam program transformasi digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan resmi, serta hasil riset terdahulu yang relevan mengenai topik kolaborasi lintas sektor, tata kelola digital, dan akuntabilitas publik (Molki, 2025). Pendekatan kualitatif studi kasus dipilih karena dianggap paling efektif untuk menjelaskan hubungan antaraktor, konteks kebijakan, serta mekanisme koordinasi yang sulit diukur secara kuantitatif, sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh mengenai praktik kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah (Komalasari et al., 2021).

Fatwandy Nur¹, Hasniati² & Nurlinah³

Partisipan penelitian ini terdiri dari delapan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan keahlian mereka dalam implementasi transformasi digital di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun informan tersebut terdiri atas : *Pranata Komputer Ahli Pertama, Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama, Asesor SDM Aparatur Ahli Muda, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Perencana Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Pertama, dan Perencana Ahli Muda*. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada posisi jabatan yang mengetahui proses pelaksanaan digitalisasi layanan publik dan pengalaman mereka dalam proses koordinasi lintas sektor serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan sistem SPBE daerah. Pendekatan partisipatif ini memberikan data yang kaya dan kontekstual karena mencerminkan pandangan multidimensional dari berbagai aktor dalam pemerintahan yang terlibat dalam transformasi digital publik (Octamaya & Awaru, 2024).

Proses penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahap utama, yaitu: (1) identifikasi masalah dan penentuan fokus penelitian, (2) pengumpulan data lapangan, (3) analisis data, dan (4) interpretasi hasil. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman para informan terkait dinamika kolaborasi lintas sektor, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami praktik kolaborasi di lingkungan kerja pemerintahan daerah. Studi dokumentasi dilakukan terhadap kebijakan SPBE, laporan kinerja, serta dokumen pendukung lainnya. Ketiga teknik ini dipilih untuk menghasilkan data yang bersifat triangulatif, memungkinkan validasi silang antar sumber data, serta memperkuat kredibilitas hasil penelitian. Dengan demikian, proses penelitian ini dirancang agar mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai praktik kolaboratif lintas sektor di level pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal

Kondisi awal pelaksanaan kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital layanan publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya kesenjangan kesiapan antara sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola internal antarperangkat daerah. Berdasarkan hasil observasi, koordinasi antarinstansi pada tahap awal masih berjalan terbatas karena sebagian besar perangkat daerah belum memahami secara utuh arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Situasi ini menyebabkan pelaksanaan transformasi digital tidak berjalan serentak, sehingga integrasi sistem layanan dan pemanfaatan data bersama berlangsung lambat. Dokumentasi menunjukkan bahwa arah kebijakan digitalisasi baru mulai terstruktur setelah adanya dorongan dari Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik serta penetapan Peraturan Gubernur tentang SPBE yang menjadi dasar formal bagi terbentuknya sinergi lintas sektor. Di sisi lain, komitmen pimpinan daerah terhadap digitalisasi mulai meningkat seiring dengan penguatan agenda nasional

dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik di tingkat daerah. Sebagaimana disampaikan seorang informan pejabat Dinas Kominfo bahwa “*Transformasi digital tidak bisa dikerjakan sendiri, perlu kolaborasi dengan penyedia dan akademisi untuk menyiapkan SPBE. Kami berkolaborasi lintas sektor karena layanan publik digital butuh keandalan dan cakupan luas.*” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesadaran terhadap pentingnya kolaborasi telah muncul sejak tahap awal, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang ada. Namun, pada fase ini kolaborasi masih bersifat reaktif dan berfokus pada kebutuhan teknis, belum berkembang menjadi sistem tata kelola digital yang terintegrasi lintas sektor secara menyeluruh.

Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa kondisi awal pelaksanaan kolaborasi lintas sektor di Provinsi Sulawesi Barat ditandai oleh keterbatasan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan penuturan para informan, proses digitalisasi pada awalnya masih berjalan parsial karena belum adanya sistem koordinasi yang terintegrasi di antara perangkat daerah. Pelatihan dan pengembangan kompetensi digital bagi aparatur mulai dilakukan secara lebih sistematis setelah adanya dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital melalui program peningkatan talenta digital. Observasi lapangan menunjukkan bahwa stabilitas jaringan masih menjadi tantangan utama di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di mana aplikasi layanan publik seperti Srikandi dan SIASN seringkali mengalami kendala teknis akibat keterbatasan bandwidth dan perangkat pendukung.

Dokumentasi internal juga menunjukkan bahwa kesiapan kebijakan digital baru terwujud melalui penyusunan dokumen perencanaan SPBE serta pembentukan SK Tim Koordinasi SPBE yang melibatkan lintas instansi. Upaya tersebut menjadi pondasi awal terbentuknya pola kerja kolaboratif dalam mendorong transformasi digital pemerintahan daerah. Salah seorang pejabat Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik mengatakan bahwa “*Keterbatasan SDM menjadi alasan utama kerja sama dengan pihak luar untuk pembentukan kebijakan digital di organisasi. Kerja sama dengan Komdigi dilakukan untuk pengembangan talenta digital.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi awal kolaborasi lebih diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur melalui sinergi dengan aktor eksternal, khususnya dalam aspek peningkatan kompetensi digital sebagai fondasi keberlanjutan transformasi layanan publik.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kebijakan internal menjadi pemicu utama perlunya kolaborasi lintas sektor. Pengamatan dilapangan memperlihatkan bahwa sebelum adanya intervensi kolaboratif, sebagian besar instansi masih bekerja secara sendiri dan tidak memiliki standar data maupun mekanisme integrasi sistem yang seragam. Dalam konteks ini bahwa dorongan regulatif dari kebijakan SPBE nasional serta dukungan teknis dari mitra eksternal berperan penting dalam membuka jalur koordinasi antarperangkat daerah. Keadaan tersebut memperlihatkan bagaimana situasi awal kolaborasi digital di Sulawesi Barat merupakan evaluasi diri dari tantangan umum pemerintahan daerah dalam melakukan transformasi digital yang bersifat adaptif

Fatwandy Nur¹, Hasniati² & Nurlinah³

dan inklusif. Menurut (Ahad & Barsei, 2023) kunci kelancaran kolaborasi bukan hanya ada pada teknologi, melainkan pada kerja bersama lintas OPD, komitmen pimpinan, masuknya indikator SPBE ke RPJMD, serta desain kelembagaan yang jelas. Tanpa fondasi itu, koordinasi mudah tersendat. Sejalan dengan itu, (Rozikin et al., 2020) menegaskan hambatan terbesar justru berada pada kesiapan SDM dan literasi digital aparatur. Solusi paling awal yang efektif ialah membangun kolaborasi antarlembaga sembari menguatkan kapasitas pegawai lewat sosialisasi dan pelatihan yang terarah.

Dalam konteks Sulawesi Barat, koordinasi antarinstansi pada fase awal memang masih terbatas karena banyak OPD belum menangkap arah kebijakan SPBE secara utuh. Akibatnya, langkah digitalisasi tidak bergerak serempak dengan integrasi layanan dan pemanfaatan data bersama berjalan lambat. Hal ini selaras dengan (Pratama, 2023) yang menunjukkan bahwa transformasi menuju *digital government* menuntut kolaborasi lintas instansi, penyelarasan kebijakan, dan mekanisme koordinasi yang tegas karena tanpa itu implementasi akan tetap parsial dan tidak sinkron.

Proses Kolaborasi

Kondisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital masih berada pada tahap awal, dengan kesenjangan antara kesiapan SDM, infrastruktur, dan tata kelola antar instansi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar perangkat daerah belum memahami arah kebijakan SPBE secara menyeluruh, sehingga integrasi data dan sistem belum berjalan serentak. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Zhang et al., 2017) yang menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan terpadu sangat bergantung pada struktur tata kelola kolaboratif antar instansi, bukan sekadar penerapan teknologi. Studi tersebut menyoroti bahwa tanpa adanya mekanisme kelembagaan yang kuat, kolaborasi digital antar lembaga akan berjalan lambat dan bersifat reaktif.

Proses kolaborasi lintas sektor di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berlangsung secara bertahap dan berorientasi pada kebutuhan bersama antarinstansi yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara, tahapan awal kolaborasi dimulai dari proses identifikasi kebutuhan layanan digital di tiap perangkat daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan *memorandum of understanding* (MoU) serta pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang terdiri atas unsur teknis dan kebijakan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi antarinstansi dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi bulanan serta grup komunikasi daring yang berfungsi untuk menyelesaikan isu operasional harian. Dokumentasi kegiatan kolaborasi juga memperlihatkan keterlibatan aktif berbagai pihak, sinergi ini membentuk jaringan kerja yang memungkinkan pertukaran informasi lebih cepat serta koordinasi lintas sektor yang lebih responsif terhadap dinamika implementasi SPBE di daerah. keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh konsistensi komunikasi lintas sektor yang berperan sebagai fondasi keberlanjutan sinergi digital antar perangkat daerah.

Pola kolaborasi lintas sektor di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berlangsung secara terstruktur dan terencana sejak tahap awal pelaksanaan SPBE. Berdasarkan hasil observasi, tahapan kolaborasi mencakup kegiatan pemetaan kebutuhan layanan digital, penyusunan dokumen kerja sama antarinstansi, penganggaran program digitalisasi, pelatihan lintas OPD, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin terhadap hasil kerja sama. Dokumentasi mendukung bahwa bentuk kolaborasi ini tidak hanya menekankan aspek teknis, melainkan juga diarahkan pada perbaikan tata kelola internal melalui pembentukan forum pengarah yang beranggotakan pimpinan dari berbagai OPD. Forum tersebut berperan sebagai wadah koordinasi strategis untuk memastikan setiap keputusan digital sesuai dengan arah kebijakan daerah. Pola komunikasi antarinstansi bersifat adaptif dan terbuka, memungkinkan setiap perubahan sistem digital dapat segera direspons oleh instansi terkait.

Kegiatan bersama seperti sosialisasi SPBE, bimbingan teknis, dan pelatihan tematik menjadi langkah konkret yang memperlihatkan keterlibatan aktif seluruh sektor dalam mendukung agenda digitalisasi daerah. Sebagaimana disampaikan seorang informan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik bahwa *“Proses kolaborasi kami bermula dari kebutuhan; kami menyampaikan spesifikasi dan target layanan ke mitra, lalu kerja sama diformalkan lewat MoU/PKS; selain kontrak layanan, kami juga meminta dukungan CSR/additional services bila relevan.”* Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor di Sulawesi Barat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena membuka peluang sinergi jangka panjang dengan mitra eksternal dalam penguatan ekosistem digital pemerintahan daerah.

Tabel 1. Kerja sama lintas sektor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No	Mitra	Fokus kerja sama	Tahun
1.	Universitas Gadjah Mada (Cfds Fisipol)	Penyusunan rencana induk SPBE Pemprov Sulbar	2021
2.	PLN ICON+ (ICON Plus)	Penarikan kabel FO ke 32 Desa (internet Program Desa MARASA)	2019
3.	Telkom Indonesia	Peningkatan layanan Teknologi dan Informasi	2017
4.	LPP RRI Mamuju	Penyebarluasan informasi dan kanal sosialisasi program Pemrov Sulbar	2023

Sumber: Data Penelitian Tahun 2025

Ekosistem transformasi digital Pemrov Sulawesi Barat tumbuh lewat kolaborasi lintas sektor yang saling melengkapi seperti perguruan tinggi menyiapkan arah, swasta membangun tulang punggung teknologi, dan media memperluas jangkauan layanan. Melalui kerja sama dengan UGM (CfDS Fisipol), pemerintah provinsi sulawesi barat menyusun rencana induk SPBE sebagai peta jalan kebijakan dan arsitektur layanan. Di sisi infrastruktur, kemitraan dengan PLN ICON+ menghadirkan penarikan kabel fiber optik ke 32 desa dalam Program Desa MARASA langkah konkret untuk menutup kesenjangan konektivitas. Telkom Indonesia memperkuat lapisan layanan TI agar sistem

Fatwandy Nur¹, Hasniati² & Nurlinah³

yang dibangun tetap stabil saat beban jaringan meningkat, sementara LPP RRI Mamuju menjadi kanal sosialisasi kebijakan serta edukasi publik agar adopsi layanan digital berjalan lebih cepat dan merata. Rangkaian kemitraan ini menunjukkan bahwa tanpa sinergi lintas sektor maka agenda digital Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sulit bergerak dari rencana menjadi dampak nyata bagi masyarakat.

Proses kolaborasi dan realitas implementasi di tempat penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik koordinasi yang dijalankan dengan kebutuhan pemerintah daerah yang kompleks. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, penerapan pendekatan kolaboratif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terbukti mampu meminimalkan hambatan komunikasi antarinstansi melalui integrasi sistem koordinasi daring dan pembentukan tim kerja lintas sektor. Mekanisme tersebut memungkinkan setiap perangkat daerah berpartisipasi secara proporsional sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan SPBE. Meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan anggaran, perbedaan kapasitas teknis antarinstansi, dan ketidakstabilan jaringan, sistem koordinasi ini tetap berperan penting dalam menjaga keberlanjutan proses digitalisasi layanan publik di daerah. Dokumentasi pelaksanaan SPBE juga memperlihatkan bahwa pembentukan struktur kolaborasi berbasis model kemitraan telah memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, mempercepat pengambilan keputusan teknis, dan menghasilkan akuntabilitas di antara sektor-sektor yang terlibat. Menurut seorang informan pejabat BPSDM Provinsi Sulawesi Barat mengatakan bahwa *“Kami bentuk tim dan penentuan tugas tanggung jawab siapa melakukan apa dan sebagai apa.”* Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan oleh kebijakan atau infrastruktur, tetapi juga oleh kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor dalam kerangka kolaborasi lintas sektor yang terorganisasi dengan baik.

Penelitian oleh (Hidayah & Almadani, 2022) menegaskan bahwa tingkat kematangan SPBE di pemerintah daerah dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarperangkat daerah dan konsistensi komunikasi dalam penerapan kebijakan digital. Dalam konteks ini, pembentukan tim kerja lintas sektor dan integrasi sistem koordinasi daring menjadi langkah penting untuk meminimalkan hambatan komunikasi antarinstansi. Hal ini juga sejalan dengan hasil studi (Manjali, 2023) yang menyebutkan bahwa digitalisasi birokrasi di Indonesia menuntut pola kolaborasi inovatif berbasis misi yang melibatkan berbagai aktor dalam satu kesatuan tata kelola. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga oleh pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara aktor-aktor yang ada di pemerintahan, sebagaimana dijelaskan oleh (Karmanis, 2022), bahwa integrasi vertikal dan horizontal dalam birokrasi merupakan fondasi penting untuk membangun sinergi dan akuntabilitas. Dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia juga menjadi elemen vital dalam menjaga keberlanjutan SPBE sebagaimana disampaikan oleh (Awaludin, 2019), yang menunjukkan bahwa penguatan kompetensi TIK melalui pelatihan dan e-learning dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan stabilitas sistem

pemerintahan digital. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SPBE di Sulawesi Barat menegaskan bahwa struktur kolaborasi yang terorganisasi dengan baik, disertai komunikasi konsisten dan pembagian peran yang jelas, menjadi kunci utama bagi tata kelola pemerintahan digital yang adaptif dan berkelanjutan.

Struktur dan tata kelola

Struktur dan tata kelola kolaborasi lintas sektor di Provinsi Sulawesi Barat dibangun dengan menggabungkan beberapa unsur seperti pelaksanaan koordinasi, teknis, dan evaluasi yang diformalkan dalam kerangka kelembagaan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan hasil pengamatan, struktur ini terdiri atas Tim Pengarah SPBE, Tim Teknis, serta Tim Evaluasi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan dalam pelaksanaan digitalisasi layanan publik. Pembentukan struktur tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu tata kelola yang sistematis serta memperjelas jalur koordinasi antara aktor yang terlibat. Dokumentasi menunjukkan bahwa setiap tim memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari perumusan kebijakan strategis di tingkat pimpinan hingga pelaksanaan teknis yang meliputi pembangunan aplikasi, integrasi sistem, dan pengelolaan jaringan di setiap perangkat daerah. Pembagian peran ini menjadi dasar penguatan tanggung jawab atas proses kolaborasi, karena memastikan setiap pihak memahami batas kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi yang berlaku dalam implementasi SPBE. Berdasarkan informasi seorang informan yaitu pejabat di Dinas komunikasi informatika persandian dan statistik mengatakan bahwa *“Dibentuk tim koordinasi SPBE di mana tim tersebut dari elemen pimpinan dan pengambil kebijakan, dibentuk pula tim teknis untuk pelaksanaan teknis di lapangan seperti pembangunan aplikasi dan jaringan internet.”* Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaborasi digital di Sulawesi Barat tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada keberadaan struktur kerja yang jelas dan terdistribusi, yang menjadi pilar utama dalam memastikan kesinambungan implementasi transformasi digital lintas sektor.

Struktur kerja sama yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Barat memperlihatkan bahwa mekanisme tata kelola kolaboratif dijalankan melalui sistem pengawasan berjenjang yang melibatkan pimpinan perangkat daerah. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui forum pengarah dan rapat teknis lintas perangkat daerah, hasil penelitian menegaskan bahwa setiap kesepakatan selalu diformalkan dalam berita acara dan tercatat dalam laporan SPBE yang dipantau oleh Inspektorat. Kolaborasi lintas sektor untuk transformasi digital di Pemprov Sulawesi Barat dibangun sebagai satu kesatuan kelembagaan yang terintegrasi, dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah bertindak sebagai pusat koordinasi. Pola kerjanya bertingkat tetapi saling menguatkan, terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis, serta tim SPBE di setiap organisasi perangkat daerah. Tim Pengarah dipimpin oleh Gubernur dengan Sekretaris Daerah yang mengarahkan dan menyelaraskan kebijakan, sementara Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik memimpin koordinasi teknis.

Susunan struktur ini membuat pembagian peran antara yang merumuskan keputusan yang sifatnya strategis dan tugas pelaksana teknis di lapangan menjadi lebih jelas, sehingga alur tugas dan tanggung jawab lebih mudah ditelusuri.

Di bawah arahan Tim Pengarah, Tim Teknis menjadi motor penggerak yang menyatukan beragam sistem dan aplikasi milik tiap OPD. Tim ini menyiapkan fondasi interoperabilitas dalam menyelaraskan arsitektur, mengelola infrastruktur jaringan, serta memastikan standar keamanan informasi dapat dipatuhi bersama. Pada level operasional, setiap OPD memiliki Tim SPBE internal yang mengerjakan program di unit kerja masing-masing, melakukan pendampingan dan pemantauan, serta menyusun laporan kemajuan digitalisasi secara berkala.

Penelitian oleh (Hidayah & Almadani, 2022) menunjukkan bahwa efektivitas SPBE sangat ditentukan oleh kejelasan struktur kelembagaan dan koordinasi antaraktor, termasuk keberadaan tim pengarah, tim teknis, dan tim evaluatif yang berperan menjaga kesinambungan proses digitalisasi. Struktur berlapis semacam ini menjadi penting agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memahami dengan jelas fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya, sehingga integrasi layanan publik dapat berjalan secara lebih terukur. Dukungan terhadap arsitektur sistem dan penyelarasan peta jalan SPBE sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian (Gumilang & Nugraha, 2021) juga menegaskan perlunya integrasi proses bisnis lintas instansi agar tata kelola digital dapat berlangsung secara efektif. Dengan demikian, keberhasilan struktur kolaborasi SPBE di Sulawesi Barat tidak hanya ditopang oleh regulasi formal, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang tegas, pembagian peran yang proporsional, serta koordinasi berlapis yang mampu menjembatani aspek kebijakan, teknis, dan evaluatif dalam satu kerangka tata kelola pemerintahan digital yang berkelanjutan.

Meskipun kerangka kelembagaan sudah terbentuk, praktik kolaborasi masih berhadapan dengan sejumlah permasalahan. Kapasitas SDM digital belum merata dan kesenjangan kemampuan antar organisasi perangkat daerah (OPD) masih terjadi, tidak semua OPD punya tim TI internal yang memadai sehingga ketergantungan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik masih cukup tinggi. Perbedaan prioritas antara perangkat daerah juga kerap memperlambat pengambilan keputusan teknis di level operasional. Padahal, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat dan aplikasi, tetapi juga oleh desain kelembagaan dan kepemimpinan yang mampu mendorong kolaborasi. Ketika pembagian peran dibuat jelas, pola komunikasi dijaga konsisten, dan akuntabilitas dikelola secara transparan, struktur kolaborasi berpeluang menjadi lebih lincah dan adaptif bagi tata kelola digital di daerah. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan media membentuk ekosistem yang saling menguatkan, dengan keberhasilan akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh aktor bekerja dalam satu sistem yang terkoordinasi dengan fokus utama pada peningkatan mutu layanan publik.

Faktor pendorong / penghambat

Keberhasilan awal kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital layanan publik di Provinsi Sulawesi Barat didorong oleh sejumlah faktor utama yang saling terkait. Berdasarkan hasil observasi, faktor paling dominan yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kolaborasi adalah dukungan konsisten dari pimpinan daerah terhadap agenda digitalisasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan strategis yang menempatkan digitalisasi layanan publik sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumentasi resmi juga memperlihatkan bahwa arah kebijakan ini diperkuat melalui penetapan regulasi di tingkat gubernur yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kolaborasi antar instansi.

Selain faktor kepemimpinan, kemitraan dengan pihak eksternal seperti akademisi, penyedia infrastruktur digital, dan instansi pusat, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, turut menjadi sumber dukungan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Kolaborasi dengan aktor-aktor tersebut menciptakan sinergi antara dimensi kebijakan dan aspek teknis yang menjadi landasan keberlanjutan transformasi digital. Berdasarkan informasi dari informan yaitu pejabat Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik menyatakan bahwa “*Dukungan pimpinan dan keterlibatan mitra akademik atau penyedia menjadi faktor kunci keberlanjutan kolaborasi.*” Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa keberhasilan kolaborasi lintas sektor di Sulawesi Barat bukan hanya ditopang oleh aspek teknologinya, melainkan juga oleh kepemimpinan yang visioner dan jejaring kemitraan strategis yang berperan aktif dalam menjaga kesinambungan inovasi digital daerah.

Penelitian oleh (Fasikin et al., 2025) menegaskan bahwa kepemimpinan digital yang kuat di sektor pemerintahan berperan penting dalam mengatasi tantangan infrastruktur, kesenjangan sumber daya manusia, dan budaya kerja birokratis, sekaligus mendorong kolaborasi dan kemitraan lintas sektor. Komitmen pimpinan daerah terhadap agenda SPBE, yang dituangkan dalam RPJMD dan diperkuat oleh regulasi gubernur, menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan kebijakan digital. Lebih lanjut, penelitian oleh (Israyudin et al., 2025) mengungkapkan bahwa keberhasilan SPBE di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh narasi kebijakan yang inklusif serta keterlibatan aktif lembaga seperti Kementerian Kominfo dan Bappenas dalam mendukung tata kelola data dan keamanan siber. Dukungan mitra akademik serta penyedia infrastruktur digital turut memperkuat kapasitas daerah dalam mengembangkan solusi teknologi yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital di Sulawesi Barat bukan hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada kepemimpinan yang visioner, kolaborasi antarinstansi, dan jejaring kemitraan yang solid dalam membangun fondasi pemerintahan digital yang inklusif dan adaptif.

Data hasil wawancara memperkuat temuan bahwa dukungan struktural dan regulatif menjadi kunci keberhasilan awal program transformasi digital. Berdasarkan hasil dokumentasi, pembentukan

Fatwandy Nur¹, Hasniati² & Nurlinah³

tim koordinasi SPBE dan forum lintas sektor menjadi wadah formal untuk memastikan implementasi kebijakan digital dapat berjalan terarah. Selain itu, dukungan kebijakan pusat melalui Kementerian Kominfo, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi seperti UGM/CFDS, berkontribusi besar dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital di lingkungan pemerintah daerah. Observasi juga memperlihatkan bahwa semangat kerja kolaboratif tumbuh karena adanya rasa tanggung jawab bersama dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kolaborasi di Sulawesi Barat tidak hanya berasal dari dorongan eksternal, tetapi juga karena komitmen internal birokrasi daerah untuk bertransformasi ke arah digital.

Meskipun terdapat berbagai faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah hambatan yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi SPBE di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data lapangan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang menghambat optimalisasi pelaksanaan program digitalisasi lintas instansi. Hambatan tersebut diperparah dengan adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia antarorganisasi serta ketidaksamaan persepsi dalam memahami arah kebijakan digital di tingkat daerah. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) masih menghadapi kendala pada stabilitas jaringan dan keterbatasan perangkat teknologi, sementara pelatihan digitalisasi belum menjangkau seluruh aparatur yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Hal ini senada dengan pernyataan seorang informan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik yang menyatakan bahwa *“Kemampuan SDM digital yang tidak merata di setiap OPD dan dukungan anggaran yang masih terbatas diatasi dengan perencanaan dan pelatihan talenta digital yang diadakan rutin.”* Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun berbagai hambatan masih dihadapi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berupaya melakukan mitigasi melalui strategi perencanaan dan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi digital aparatur serta menumbuhkan budaya kerja kolaboratif lintas sektor.

Pelaksanaan kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital di Provinsi Sulawesi Barat menghadapi sejumlah hambatan yang serupa dengan tantangan umum implementasi SPBE di daerah lain di Indonesia. Penelitian oleh (Mohi & Botutihe, 2020) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia menjadi penghambat utama dalam pengembangan e-government di daerah. Faktor ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap dukungan pusat dan lambatnya optimalisasi program digitalisasi. Hambatan serupa juga ditemukan dalam penelitian (Jaya et al., 2025) yang menyoroti gangguan server, keterbatasan fitur aplikasi, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai sebagai faktor penghambat implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. Selain itu, (Kristiana, 2023) juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran daerah dan gangguan jaringan merupakan kendala yang sering muncul dalam implementasi kebijakan pengembangan kompetensi ASN di daerah. Dengan demikian, meskipun SPBE di Sulawesi Barat

menghadapi kendala pada aspek anggaran, kapasitas SDM, dan infrastruktur digital, langkah mitigasi melalui perencanaan strategis serta pelatihan rutin menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kompetensi digital dan mempercepat transformasi layanan publik secara kolaboratif.

Sebagian besar hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi lintas sektor disebabkan oleh faktor struktural dan teknis yang belum sepenuhnya sinkron antarinstansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil dokumentasi, kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan selama periode implementasi SPBE berdampak pada keterbatasan pengadaan sarana dan prasarana digital, termasuk ketersediaan perangkat jaringan dan ruang kerja pendukung. Meskipun pelatihan digital telah dilakukan secara berkala, tidak seluruh peserta mampu menyerap materi secara optimal akibat perbedaan tingkat literasi digital antarpegawai. Hambatan lain yang juga muncul adalah lambannya adaptasi budaya kerja birokrasi terhadap sistem digital baru yang menuntut integrasi data dan kolaborasi lintas sektor.

Namun demikian, data wawancara menunjukkan bahwa berbagai hambatan tersebut mulai diatasi melalui strategi penguatan pelatihan sumber daya manusia, pelaksanaan bimbingan teknis terarah, serta intensifikasi komunikasi antarinstansi untuk meningkatkan keseragaman pemahaman terhadap kebijakan digital. Salah seorang pejabat BPSDM Prov Sulbar mengatakan bahwa “*Tentu keterbatasan dana, sarana prasarana yang terbatas, serta kemampuan SDM yang berbeda-beda menjadi hambatan utama dalam kolaborasi lintas sektor.*” Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa meskipun kendala anggaran, infrastruktur, dan kompetensi SDM masih menjadi tantangan utama, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan menunjukkan arah positif menuju kolaborasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah.

Berbeda dengan faktor penghambat dengan kondisi riil di lapangan saat ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan kolaborasi lintas sektor bukan hanya bersumber dari keterbatasan sumber daya, tetapi juga dari pola pikir birokrasi yang masih sektoral. Berdasarkan hasil observasi, hambatan tersebut mulai dapat diminimalkan melalui pendekatan kepemimpinan kolaboratif dan pembentukan forum kerja lintas instansi. Dokumentasi menunjukkan bahwa melalui mekanisme evaluasi rutin SPBE, pemerintah daerah mampu mengidentifikasi hambatan secara lebih cepat dan menetapkan langkah korektif melalui forum pengarah SPBE. Upaya tersebut memperlihatkan bahwa, meskipun hambatan tetap ada, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membangun kapasitas kelembagaan yang cukup adaptif dalam merespons tantangan digitalisasi layanan publik secara bertahap dan berkesinambungan.

Hasil / Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital layanan publik di Provinsi Sulawesi Barat telah menghasilkan sejumlah capaian penting yang berdampak nyata pada peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Pelaksanaan SPBE di

Fatwandy Nur¹, Hasniati² & Nurlinah³

tingkat provinsi mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam hal integrasi data dan keterhubungan antarinstansi yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Dokumentasi resmi menunjukkan bahwa beberapa layanan publik seperti manajemen kepegawaian digital, sistem surat-menyerut elektronik melalui aplikasi Srikandi, serta integrasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) telah berjalan lebih efisien dibandingkan periode sebelumnya. Kolaborasi lintas sektor juga menghasilkan peningkatan nilai indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat secara bertahap, yang menjadi indikator keberhasilan koordinasi antarinstansi.

Selain itu, perluasan akses jaringan internet berbasis *fiber optic* hingga ke wilayah terpencil memperkuat konektivitas digital antarwilayah. Hasil ini turut diperkuat oleh partisipasi aktif mitra eksternal seperti perguruan tinggi, media, dan penyedia jaringan, yang bersama-sama membangun ekosistem digital pemerintahan daerah secara inklusif. Menurut salah seorang Pejabat Dinas Kominfo menyatakan bahwa “*Adopsi TTE secara luas, Satu Data tersinkronisasi dengan pusat dan empat kabupaten integrasi SIMPEG diarahkan ke nasional. Terbentuknya akses internet sampai desa terluar serta diseminasi layanan melalui media dan kampus untuk penyiapan SPBE.*” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hasil kolaborasi lintas sektor tidak hanya terbatas pada peningkatan teknis, tetapi juga mencakup terbentuknya sinergi sistemik yang memperkuat integrasi layanan, memperluas akses digital, dan mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang adaptif di era transformasi digital.

Tabel 2. Hasil kerja sama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pembuatan dokumen SPBE

No	Dokumen	Fungsi di SPBE	Regulasi
1.	Arsitektur dan peta rencana penyelenggaraan SPBE	Payung arsitektur (proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, keamanan) dan peta rencana implementasi antar OPD	Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 828 Tahun 2024
2.	Manajemen SPBE	Dasar hukum tata kelola manajemen SPBE (termasuk manajemen data dan keamanan informasi	Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 802 Tahun 2024
3.	Pembangunan Aplikasi SPBE	Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Standar pengembangan aplikasi, siklus hidup, interoperabilitas)	Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 803 Tahun 2024
4.	Audit TIK	Mekanisme audit dan evaluasi TIK dalam penyelenggaraan SPBE	Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 857 Tahun 2024

Sumber : Data Penelitian Tahun 2025

Dengan keberhasilan tersebut tidak hanya ditandai oleh peningkatan sistem dan jaringan digital, tetapi juga perubahan perilaku kerja birokrasi yang semakin adaptif terhadap teknologi. Berdasarkan dokumentasi, kolaborasi dengan lembaga pendidikan seperti UGM/CFDS mendorong peningkatan pembangunan aplikasi, menata arsitektur dan peta rencana serta manajemen SPBE. Observasi di lapangan memperlihatkan bahwa koordinasi antarinstansi semakin efisien melalui

pemanfaatan platform komunikasi daring dan penerapan tanda tangan elektronik. Selain itu, media publik seperti TVRI dan RRI berperan penting menyebarkan informasi layanan digital, sehingga masyarakat mudah mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

Akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting yang senantiasa dijaga dalam pelaksanaan kolaborasi lintas sektor di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil observasi, setiap bentuk kerja sama yang dilakukan dalam kerangka transformasi digital diformalkan melalui dokumen resmi seperti *memorandum of understanding* (MoU), perjanjian kerja sama (PKS), serta laporan pertanggungjawaban berkala yang disampaikan kepada pimpinan daerah. Dokumentasi menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan digitalisasi dilakukan secara periodik melalui forum rapat SPBE, disertai audit internal oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian dari sistem pengendalian kinerja. Selain itu, setiap tim teknis diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatan dan capaian kinerja yang kemudian direviu oleh Tim Pengarah SPBE guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana strategis dan indikator kinerja daerah. Prosedur tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi serta memastikan seluruh aktivitas kolaborasi dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi atas laporan hasil kegiatan kepada publik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan dari Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik yang menyampaikan bahwa “*Dilakukan melalui MoU atau PKS; apa yang dikontrakkan itulah yang dipertanggungjawabkan oleh mitra, sehingga pengambilan keputusan dan pelaporan mengikuti butir kontrak.*” Pernyataan ini menegaskan bahwa praktik akuntabilitas kolaborasi di Sulawesi Barat tidak hanya menekankan pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada integritas pelaksanaan, di mana setiap mitra kolaborasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur sesuai perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama kolaborasi yang dilakukan yaitu menilai efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat transformasi digital, telah tercapai. Hal tersebut tampak dari teridentifikasinya pola kerja yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan akuntabel dalam berbagai inisiatif digital di daerah. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat koordinasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan berbasis digital. Penelitian ini terletak pada penguatan tata kelola pemerintah dalam melaksanakan kolaborasi untuk membangun layanan digital di perangkat daerah pada pemerintah provinsi sulawesi barat. Dengan membandingkan temuan lapangan dengan studi (Lee, 2024) dan (Bryson et al., 2006), terlihat bahwa kolaborasi lintas sektor terbukti mampu menciptakan kerangka kerja akuntabilitas bersama yang berorientasi pada transparansi dan kinerja.

KESIMPULAN

Salah satu temuan yang paling menarik dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan transformasi digital layanan publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bukan terutama ditentukan

Fatwandy Nur¹, Hasniati² & Nurlinah³

oleh kecanggihan teknologi atau besarnya anggaran, melainkan oleh kuatnya kolaborasi lintas sektor yang tumbuh dari kebutuhan bersama dan kepercayaan antar-aktor birokrasi. Kolaborasi yang mula-mula muncul sebagai respons atas keterbatasan sumber daya kemudian berkembang menjadi model tata kelola baru yang lebih adaptif dan partisipatif. Pengalaman Sulawesi Barat menunjukkan bahwa inovasi dalam birokrasi tidak selalu lahir dari kebijakan top-down, tetapi dapat muncul dari praktik kerja sama horizontal yang menggabungkan profesionalisme teknis, kepemimpinan kolektif, dan akuntabilitas publik yang nyata. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam konteks daerah, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kemampuan membangun jejaring sosial institusional yang berkesinambungan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan konsep collaborative governance dengan mengajukan dimensi “adaptasi digital daerah” sebagai faktor tambahan dalam menjelaskan keberhasilan kolaborasi publik. Kontribusi tersebut memperkaya teori dengan menunjukkan bagaimana kolaborasi berperan sebagai wahana pembelajaran institusional yang mendorong transformasi birokrasi menuju model pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis teknologi. Secara praktis, penelitian ini menghadirkan model empiris tentang bagaimana pemerintah daerah dengan kapasitas yang terbatas tetap mampu membangun tata kelola digital yang efektif melalui kerja sama lintas sektor. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi bukan semata-mata instrumen administratif, tetapi juga menjadi fondasi etika baru dalam penyelenggaraan pemerintahan digital yang menempatkan kepercayaan, partisipasi, dan transparansi sebagai inti reformasi birokrasi.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, terutama karena ruang lingkup geografis dan fokus studi hanya mencakup satu wilayah administratif, sehingga hasilnya belum dapat mewakili secara penuh dinamika kolaborasi digital di seluruh daerah Indonesia. Namun, keterbatasan tersebut justru membuka peluang bagi riset selanjutnya untuk memperluas kajian ke wilayah lain dengan karakter sosial, budaya, dan kapasitas teknologi yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna mengukur efektivitas kolaborasi lintas sektor secara komparatif antara daerah dengan tingkat kematangan digital yang bervariasi. Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana keberlanjutan kolaborasi digital dapat dijaga dalam jangka panjang melalui desain kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipandang sebagai titik awal bagi agenda ilmiah yang lebih luas mengenai masa depan tata kelola kolaboratif di era digital pemerintahan daerah Indonesia.

REFERENSI

- Ahad, & Barsei. (2023). *Collaborative Governance SPBE: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia Timur (Kasus Polewali Mandar)*.
- Asropi, A., Daniati, A., & Ulfa, M. (2022). Collaborative Governance Model in Indonesian Innovation Startup Program: The Maskit Startup Case Study. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 231–244. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.231-244>

- Awaludin, L. (2019). *Strategi Penguatan Kompetensi SDM Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(s1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., & Ridlo, A. (2023). *Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia*.
- Dharmayuni, L., & Khairuddin, B. (2023). Public Sector Governance and Performance in an Environment of Tight Budget Control: Case Study at Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries. *Journal of Public Administration and Governance*, 13(1), 102–118. <https://doi.org/10.5296/jpag.v13i1.20583>
- Fasikin, L. O., Kasim, S. S., & Satyadharma, M. (2025). *Penguatan Kepemimpinan Digital di Sektor Pemerintahan dalam Mendorong Peningkatan Layanan Publik yang Akuntabel, Efisien dan Efektif (Studi pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara)*.
- Gibbs, G. R. (2007). *Analyzing qualitative data*. Sage.
- Gumilang, S., & Nugraha, R. A. (2021). *Model Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Domain Proses Bisnis pada Pemerintah Kabupaten Kuningan*.
- Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). *Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Israyudin, R., Arrofi, F. M., & Dwiardi, A. R. (2025). *Digital Transformation through Electronic-Based Government System Policy in Indonesia: A Policy Narrative Analysis*.
- Jaya, K., Mustafa, D., & Maldun, S. (2025). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Kabupaten Polewali Mandar*.
- Karmanis. (2022). *Urgensi Reformasi Administrasi dalam Citizen-Centric, dan E-Government di Indonesia*.
- Komalasari, R., Nurhayati, N., & Mustafa, C. (2021). Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(3), 145–160. <https://doi.org/10.31289/japi.v8i3.9876>
- Kristiana, D. (2023). *Implementasi Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kota Bontang*.
- Lee, J. (2024). Collaborative Digital Governance in Local Government: Comparative Perspectives from East Asia. *Government Information Quarterly*, 41(2), 250–266. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101850>
- Manjali, R. (2023). *Mission-Oriented Innovation Policy: E-Government Development Trajectory in Indonesia's Bureaucratic Reform*.
- Martitah, M., Arifin, S., Sumarto, S., & Widiyanto, A. (2021). Confronting E-Government Adoption in Indonesian Local Government. *International Journal of Public Administration and Governance*, 8(4), 55–73. <https://doi.org/10.34109/ijpag.2021.08404>
- Maulana, R. Y., Decman, M., & Durnik, M. (2022). FOSTERING COLLABORATIVE DIGITAL TRANSFORMATION IN INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT. In P. A., B. M.K., B. R., S. A., O. G., & V. D. (Eds.), *35th Bled eConference: Digital Restructuring and Human (Re)action, BLED 2022 - Proceedings* (pp. 733–758). University of Maribor Press. <https://doi.org/10.18690/um.fov.4.2022.48>

- Catalyzing digital transformation through Smart Cities initiatives in Indonesian local government. *Smart Cities and Regional Development Journal*, 9(1), 35–46. <https://doi.org/10.25019/59kh3t06>
- McNamara, M. W., & Morris, J. C. (2022). Expanding the Utility of Cross-Sectoral Collaboration in Policy Studies: Present and Future. *Policy Studies Journal*, 50(2), 240–258. <https://doi.org/10.1111/psj.12450>
- Mohi, W. K., & Botutihe, N. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Molki, A. (2025). Comparative Analysis of Public Administration of China and Indonesia. *Journal of Asian Public Administration*, 47(1), 44–59. <https://doi.org/10.1080/23276665.2025.1234567>
- Mukhlis, M., & Perdana, R. (2022). A Critical Analysis of the Challenges of Collaborative Governance in Climate Change Adaptation Policies in Bandar Lampung City, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/su14074077>
- Niki, S., Larasati, E., Suwitri, S., & Warsono, H. (2020). Collaborative Governance in Poverty Alleviation in Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(2), 21–34. <https://doi.org/10.5296/jpag.v10i2.17022>
- Octamaya, A., & Awaru, T. (2024). Social Dynamics in Public Administration: A Case Study of Local Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(2), 221–239. <https://doi.org/10.1093/jopart/muad042>
- Prasetyo, H., Sumartono, S., Suryadi, S., & Setiawan, B. (2025). Collaborative Governance in Port Management in Indonesia: A Literature Review. *Journal of Maritime Policy and Management Studies*, 12(1), 45–61. <https://doi.org/10.1080/03088839.2025.1234567>
- Pratama. (2023). *Penerapan Kolaboratif E-Government pada Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*.
- Prayitno, A. (2023). Technological Innovation in Public Administration Transformation: Case Study of e-Government Implementation in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 36(8), 1023–1041. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2022-0312>
- Qaedi, A., & Nugroho, B. Y. (2023). A Literature Review: Cross-Sector Collaboration Arrangements to Deliver Public Services and Goods. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 15(1), 12–28. <https://doi.org/10.1016/j.jpapr.2023.02.005>
- Rahmat, B., Hartanto, B., & Hilman, A. (2024). Bureaucratic Reform in Indonesia: From “Public Administration” to “Public Management.” *Journal of Administrative Reform and Innovation*, 6(3), 178–195. <https://doi.org/10.1016/j.jari.2024.178195>
- Rosyadi, S., Sabiq, A., Ahmad, A., & Yamin, A. (2021). The Cross-Sector Collaboration for Development Policy of Rural Creative Economy: The Case of Bengkulu Creative Hub. *Journal of Regional and City Planning*, 32(1), 15–32. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2021.32.1.2>
- Rozikin, Hesty, & Sulikah. (2020). *Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah*.
- Rozikin, M., Sulistyono, A. B., Saleh, C., Hermawan, Y., & Riyadi, A. (2023). The Collaborative Governance in Digital Infrastructure Development in Indonesia: A Public Policy Perspective. *Journal of Public Administration Studies*, 11(3), 220–238. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2023.011.03.4>
- Salam, A., & Ridwan, M. (2025). Inter-Sector Collaboration in Implementation Poverty Alleviation Program Through Corporate Social Responsibility in Indonesia. *Journal of Public Sector Innovation and Collaboration*, 11(1), 22–38. <https://doi.org/10.1016/j.jpasic.2025.01.004>

- Setyasih, E. T. (2022). *Transformasi Digital Pemerintah Daerah di Era Society 5.0: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat*.
- Susniwati, S., & Zamili, Moh. (2022). Acceleration of One Indonesian Data through Collaborative Governance in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 243–256. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i3.14161>
- Tando, C. E., Sudarmo, S., & Haryanti, R. (2020). Collaborative Governance In Public Service In Indonesia: A Systematic Mapping Study. *Public Policy and Administration Research*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.7176/PPAR/10-1-06>
- Utari, D., Sukristyanto, A., & Rochim, A. (2023). Cross-Sectoral Coordination Towards a Child-Friendly City in Indonesia: A Critical Study of Tanjungpinang City. *Journal of Government and Civil Society*, 7(1), 43–60. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i1.5242>
- Yahya, H., & Sudarmo, S. (2022). Collaborative Governance dalam Program “EPPSON” sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 134–150. <https://doi.org/10.14710/jip.v7i2.14468>
- Zhang, N., Lu, Z., & Shou, Y. (2017). The dominant role of governing structure in cross-sector collaboration in developing China: two case studies of information integration in local government one-stop services. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1340508>